

Masa Reses Tak Boleh Dimanfaatkan Anggota DPR Kampanye Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi pada Bawaslu RI, Puadi, mewanti-wanti anggota DPR RI agar memanfaatkan masa reses untuk menampung aspirasi masyarakat.

Masa reses, ditegaskan Puadi, tak boleh dijadikan ajang kampanye Pemilu 2024. Masa reses memang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Di mana, dalam UU tersebut para wakil rakyat itu harus menyampaikan reses kepada konstituannya.

"Namanya reses menyampaikan kepada konstituante seperti biasa. Hanya saja tidak boleh ada ruang kampanye, terutama caleg (Calon Anggota Legislatif) yang sedang

melakukan reses tersebut," katanya dalam keterangannya, Jumat, (29/9).

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas memfasilitasi reses tersebut, harus bisa memosisikan dirinya untuk tetap netral dan menjalankan tugas sesuai aturan perundang-undangan.

"Kaitannya dengan netralitas, saya kira (ASN yang memfasilitasi) harus bisa memosisikan. Kalau tugasnya untuk memfasilitasi tidak jadi masalah," ungkap kandidat Doktorat Universitas Nasional itu.

"Yang tidak boleh itu (ASN) bersikap dengan menunjukkan keberpihakan yang cenderung menguntungkan atau merugikan," kata Puadi.

● han

Panglima TNI Rombak Jajaran Perwira Tinggi di Tubuh BIN

JAKARTA (IM) - Empat perwira tinggi TNI yang bertugas di Badan Intelijen Nasional (BIN) dirotasi Panglima TNI Yudo Margono.

Rotasi dan mutasi ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1111/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan mutasi dan promosi.

Berikut nama-nama yang dirotasi dan mutasi:

1.. Brigjen TNI Ruddy Prasemisa Mahks, M.Han dari Kabinda Jawa Barat pada Deputy Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN

(Sertijab menunggu Kepres).

2. Brigjen TNI Murbianto Adhi Wibowo, S.Sos dari Kapusdiklat BIN menjadi Agen Intelijen Ahli Madya Pada Direktorat Kontra Separatisme dan Konflik, Deputy Bidang Kontra Intelijen BIN.

3. Brigjen TNI I Gusti Agung Winatha dari Agen Intelijen Ahli Madya pada Direktorat Kontra Separatisme dan Konflik, Deputy Bidang Kontra Intelijen BIN menjadi Kapusdiklat BIN.

4. Mayjen TNI Kup Yanto Ssetiono, M.A. dari Tenaga Ahli Pengajar Bid. Strategi Lemhanas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). ● han

KPK Duga Sejumlah Proyek di Kemenaker Pesanan Pejabat

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sejumlah proyek pengadaan barang/jasa di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenerker) dipesan oleh beberapa pejabat.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mendalami dugaan pesanan proyek tersebut kepada anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim, Rabu (27/9).

Ia diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenaker tahun 2012.

Saat itu, Kemenaker masih bernama Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan dipimpin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Dikonfirmasi juga mengenai dugaan adanya pesanan pengaturan untuk berbagai proyek pengadaan oleh beberapa pejabat di Kemenaker," kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (29/9).

Luqman diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan staf khusus (Stafus) di Kemenaker RI. Pengetahuan Luqman ketika menduduki

jabatan itu menjadi salah satu materi yang dikorek tim penyidik.

"Didalami pengetahuannya antara lain kaitan posisi saksi sebagai salah satu staf khusus di Kemenaker saat itu," tutur Ali.

Selain Luqman, KPK juga memeriksa dua pegawai negeri sipil (PNS) Kemenaker bernama Rinto Sugita dan Irwan Arifiyanto. Mereka ditidali mengenai proses perencanaan hingga lelang pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker.

"Kedua saksi hadir dan didalam kembali kaitan perencanaan sampai dengan tahap lelang untuk pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI," ujar Ali.

Selain Luqman, KPK sebelumnya juga telah memeriksa mantan anak buah Cak Imin, Reyna Usman (RU) terkait transaksi perbankan para tersangka.

Reyna diketahui pernah menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2012.

KPK juga telah menggeledah kediaman Reyna di Kabupaten Badung, Bali pada Kamis (7/9) lalu. Dari penggeledahan itu penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen transaksi keuangan.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya telah menetapkan tiga orang tersangka yang terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta.

Menurut Asep, salah satu tersangka merupakan mantan anak buah Muhaimin Iskandar yang menjabat sebagai direktur jenderal (Dirjen) di Kemenakertrans saat itu dan berinisial RU. Para tersangka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dari nilai kontrak lebih dari Rp 20 miliar. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



KPK RILIS HASIL PENGELEDAHAN RUMAH DINAS MENTAN

Juru Bicara KPK Ali Fikri (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil penggeledahan terhadap rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (29/9). KPK menyita sejumlah uang rupiah, uang dolar AS, catatan keuangan dan sejumlah dokumen dalam penggeledahan yang juga dilakukan terhadap ruang Mentan di Kantor Kementerian Pertanian dan ruang-ruang Sekjen di kompleks Kementerian Raganun tersebut.

Elektabilitas Ganjar di Jatim 44 Persen, Prabowo 23 Persen, Anies 14,2 Persen

Suara Anies di Jawa Timur tidak banyak berbeda dengan suaranya di tingkat nasional. Malahan cenderung lebih rendah dari tingkat nasional

JAKARTA (IM) - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan, bakal calon presiden (capres) dari PDI-P, Ganjar Pranowo unggul di Jawa Timur (Jatim). Elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.

Ganjar menempati posisi capres dengan elektabilitas tertinggi di Jatim dengan

angka 44 persen. Kepala responden, SMRC bertanya, "bila pemilihan Presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan bapak/ibu pilih sebagai presiden di antara nama berikut?"

"Maka pilihan yang pertama adalah pada Ganjar Pranowo 44 persen, kemudian Prabowo Subianto 23 persen. Anies Baswedan 14,2 persen. Dan sisanya 18,8 persen menyatakan belum tahu akan memilih siapa," ujar pendiri

SMRC, Saiful Mujani, dalam jumpa pers virtual, seperti dikutip pada Jumat (29/9).

Saiful menjelaskan, jika melihat hasil survei capres di Jatim ini, suara Anies tidak banyak berbeda dengan suaranya di tingkat nasional. Malahan, kata dia, suara Anies di Jatim cenderung lebih rendah dari tingkat nasional.

"Jadi di survei nasional kita temukan bahwa sebelumnya di survei telepon nasional kita temukan angka di kisaran 16-17 persen. Sekarang 14 persen. Jadi tidak berbeda secara signifikan," tuturnya.

Maka dari itu, Saiful menilai deklarasi yang Anies lakukan di Jatim beberapa waktu lalu tidak membuat elektabilitasnya menguat. Dalam

hal ini, Anies menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapresnya.

"Jadi sementara ini Jawa Timur ini 44 persen Ganjar, dan Prabowo 23 persen. Jadi kalau di angka ini Ganjar unggul cukup signifikan terhadap kedua calon ini, terutama ke-

pada Anies Baswedan, selisihnya 30 persen," imbuh Saiful.

Adapun survei ini dilakukan pada 2-11 September 2023 dengan wawancara secara tatap muka. Ada 150 sampel yang diambil dalam survei SMRC ini. Margin of error dari survei ini berada di angka +/- 8,2 persen. ● han

FOTO: ANTARA



MENPPPA DAMPINGI PENYERAHAN BAYI TERTUKAR DI BOGO

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (kedua kiri) bersama Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro (kedua kanan) serta kedua orang tua bayi tertukar Siti Mauliah (kiri) dan Dian Prihatini (kanan) usai proses terminasi dan reintegrasi sosial di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/9). Dua bayi tertukar di Bogor EL (1), dan DN (1), resmi diserahkan ke orang tua biologisnya usai menjalani proses bonding yang dijalani kedua bayi dan para orang tua hingga mencapai proses reintegrasi atau penyatuan kembali.

Kampaye di Kampus Hendaknya Tetap Memperhatikan UU dan Peraturan KPU

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mendukung diperbolehkannya peserta Pemilihan Umum 2024 berkampanye di ruang pendidikan.

Ia menilai sebaiknya ada peraturan yang mengatur pemilihan ruang pendidikan yang boleh digunakan untuk kampanye. Kampanye cukup dilakukan di lembaga pendidikan tinggi seperti kampus atau universitas.

"Kalau di kampus, ada sisi baiknya. Kalau sekolah menengah atau di madrasah sebaiknya tidak," ujar Muhadjir.

Kampanye di kampus diperbolehkan karena mahasiswa sudah memiliki hak pilih dan bisa memberikan pengetahuan dan pendidikan politik kepada masyarakat luas. Kendati begitu, Muhadjir menghimbau agar kampanye di kampus tetap memperhatikan larangan-larangan kampanye yang telah diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU.

"Kampanye (di kampus) tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, jangan menimbulkan hal yang tidak baik," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya akan melakukan revisi terhadap Peraturan KPU tentang kampanye di lokasi institusi pendidikan

Gerindra: Apakah Pantas Kami Tawarkan (Ganjar) untuk Posisi Cawapres ke PDI-P?

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Habiburokhan, kembali memberikan tanggapan perihal wacana duet antara bakal calon presiden (capres) dari PDI-P, Ganjar Pranowo dengan bakal capres dari Gerindra, Prabowo Subianto.

Habiburokhan menegaskan bahwa Gerindra tetap berpegang kepada keputusan mendorong Prabowo Subianto sebagai bakal capres di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Oleh karenanya, Gerindra mempertimbangkan sisi kepantasan apabila ingin menawarkan posisi bakal calon wakil presiden (cawapres) kepada Ganjar Pranowo.

"Saya enggak bisa menilai, tapi dalam konteks kepantasan, apakah pantas kami tawarkan posisi (bakal) cawapres kepada PDI-P yang partai besar, dua kali pemenang pemilu?" ujar Habiburokhan dalam acara Satu Meja The Forum yang tayang di Kompas TV, Kamis (28/9).

Hal itu disampaikan Habiburokhan menjawab pertanyaan soal apakah mungkin

jika nantinya Prabowo berduet dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Pak Ganjar juga tokoh sangat potensial. Apakah pantas kami tawarkan cawapres kepada beliau? Itu kan soal kepantasan," kata Habiburokhan.

"Di sisi lain, kita enggak akan mundur satu langkah saja, enggak akan mundur. (Prabowo) Sebagai (bakal) capres enggak akan mundur," ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Habiburokhan juga menjelaskan soal awal mula isu duet Ganjar-Prabowo dari sudut pandang Partai Gerindra. Menurutnya, memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjelaskan soal siapa saja nama-nama yang berpotensi sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo.

Pernyataan Presiden itu disampaikan setelah Ganjar dideklarasikan PDI-P sebagai bakal capres yang diusung untuk Pilpres 2024.

"Bahwa apa yang terjadi ketika setelah pengumuman Ganjar sebagai bakal capres, Pak Jokowi (ketika) hari raya

(Idul Fitri) menyatakan bakal cawapres Pak Ganjar. Lalu, ada (disebut) termasuk termasuk Pak Prabowo akan menemukan bakal cawapresnya," kata Habiburokhan.

"Sudah kami konfirmasi, maksud Pak Jokowi bukan Prabowo menjadi cawapres Ganjar, tapi Pak Prabowo akan menemukan cawapres sendiri juga," ujarnya melanjutkan.

Habiburokhan juga menyatakan bahwa saat Ganjar bersama Prabowo dan Presiden Jokowi menghadiri panen raya di Kebumen pada Maret 2023, tidak ada permintaan agar keduanya berduet sebagai bakal capres-cawapres. Sebel umnya, Ganjar Pranowo menyatakan, peluang dirinya dipasangkan dengan Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, mungkin terjadi.

"Kalau politik itu, sebelum nanti ditetapkan di KPU (Komisi Pemilihan Umum), semua peluang bisa terjadi," kata Ganjar singkat saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat pada 20 September 2023. ● han

FOTO: ANTARA



WORKSHOP PELIPUTAN PEMILU 2024 DI MATARAM
Anggota Bawaslu NTB Umar Achmad Seth (kanan) bersama Ketua KPU NTB Suhardi Soud (kiri) dan Anggota Dewan Pers Totok Suryanto (tengah) menyampaikan materinya saat Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Mataram, NTB, Jumat (29/9). Workshop yang digelar Dewan Pers yang diikuti peserta dari unsur pers, aparat penegak hukum dan penyelenggara Pemilu tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas peliputan media massa untuk terciptanya ruang publik yang kondusif, sehat dan bersih dari berita palsu (fake news) serta hoaks pada liputan Pemilu 2024.

PENGUMUMAN LIKUIDASI
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT SHISEIDO PROFESSIONAL INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseoran), Nomor 33, tanggal 29 September 2023, yang dibuat oleh Sandi Guntara Trisna, Sarjana Hukum, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham diantaranya telah menyetujui dan memutuskan membarukan Perseoran dengan menunjuk pihak luar yaitu VANESSA WIJAYA sebagai Tim Likuidator Perseoran.
Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Tim Likuidator Perseoran selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.
30 September 2023, Tim Likuidator
PT. SHISEIDO PROFESSIONAL INDONESIA (dalam likuidasi)